



Perlawanan Pedagang Kaki Lima dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang.

Dedek Hardiyanti^{1*}, Mellyana Candra², Norsyakina³, Ririn Murtiani⁴

¹⁻⁴Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia.

Korespondensi Penulis : dedekhardiyanti6@gmail.com*

Abstract. *In Tanjungpinang, street vendors' (PKL) resistance to government policy demonstrates the complex dynamics of informal economy management. The purpose of this research is to gain an understanding of the different types of PKL resistance, the methods they use, and how it impacts on local economic policy. Relevant scientific documents were analyzed using a literature study approach. The results show that street vendors not only carry out physical resistance, but also carry out symbolic and cultural actions. As a result, organized social movements emerge. The government's top-down policies often cause tensions, so discussions and cooperation are needed to create more inclusive and participatory policies. Economic empowerment, spatial flexibility, and the development of public-private partnerships are some of the suggested solutions. It is hoped that this research will make a significant contribution to building a policy model that is more responsive to the social realities of society, especially with regard to vulnerable groups.*

Keywords: Policy; Resistance; Street trading

Abstrak. Di Tanjungpinang, perlawanan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan dinamika kompleks dalam pengelolaan ekonomi informal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai jenis resistensi PKL, metode yang mereka gunakan, dan bagaimana hal itu berdampak pada kebijakan ekonomi lokal. Dokumen ilmiah yang relevan dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL tidak hanya melakukan perlawanan fisik, tetapi juga melakukan tindakan simbolik dan kultural. Akibatnya, gerakan sosial terorganisir muncul. Kebijakan top-down pemerintah sering menyebabkan ketegangan, sehingga diperlukan diskusi dan kerja sama untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemberdayaan ekonomi, fleksibilitas penataan ruang, dan pengembangan kemitraan publik-swasta adalah beberapa solusi yang disarankan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun model kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang rentan.

Kata Kunci: Kebijakan; Perdagangan kaki lima; Perlawanan

1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perekonomian di berbagai kota di Indonesia, termasuk Tanjungpinang, dimana mereka memainkan peran penting sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun keberadaan mereka sering dianggap mengganggu keterbitan umum dan tidak sejalan dengan perencanaan kota, yang membuat posisi mereka rentan terhadap intervensi kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara upaya untuk melestarikan ekonomi informal dan tuntutan modernisasi perkotaan.

Dalam konteks ini, perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada mereka tidak semata-mata sebagai bentuk penolakan biasa, tetapi telah berkembang menjadi sebuah gerakan sosial yang memiliki

struktur, strategi, dan tujuan yang jelas, dimana mereka tidak hanya berjuang untuk mempertahankan ruang usaha yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun, tetapi juga menuntut pengakuan atas kontribusi ekonomi dan sosial yang telah mereka lakukan terhadap masyarakat luas, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Ketegangan antara PKL dan pemerintah kota seringkali muncul akibat pendekatan kebijakan yang mengedepankan formalitas dan estetika kota tanpa mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi masyarakat akar rumput, dimana kebijakan rekolasi atau penertiban serius seperti hilangnya mata pencaharian, marjinalisasi ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup keluarga-keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal, sehingga menimbulkan resistensi kolektif yang pada akhirnya mendorong muncul pola-pola perlawanan yang semakin kompleks.

Perlawanan yang dilakukan oleh PKL tidak selalu bersifat fisik atau konfrontatif, namun lebih sering dalam bentuk aksi-aksi simbolik, legalistik, kultural, seperti pembentukan paguyuban, pengajuan petisi kepada pemerintah, penggunaan media untuk membentuk opini publik dan pembentukan aliansi dengan LSM, akademisi bahkan anggota legislatif, di mana semua strategi tersebut merepresentasikan perjuangan untuk mendapatkan ruang tawar-menawar dalam proses penyusunan kebijakan agar kepentingan mereka juga dipertimbangkan dalam agenda pembangunan kota yang selama ini cenderung elitis dan eksklusif.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau memiliki dinamika yang unik dalam hal relasi antara pelaku ekonomi informal dengan pemerintah kota, di mana kebijakan-kebijakan ekonomi lokal yang dibuat seringkali bersinggung langsung dengan keberadaan PKL. Resistensi yang muncul tidak lepas dari sejarah panjang pengelolaan ruang publik, keberpihakan kebijakan, dan dinamika sosial-politik yang terjadi di daerah tersebut, yang kesemuanya turut membentuk pola interaksi yang khas antara negara dan warga kota yang bergerak di sektor informal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlawanan PKL terhadap kebijakan pemerintah bukan hanya sekedar ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tetapi juga merupakan cerminan ketegangan struktural antara logika pembangunan neoliberal yang mengedepankan efisiensi dan estetika, dengan logika kesejahteraan sosial yang menghendaki adanya pemerataan kesempatan ekonomi dan keadilan distribusi, dimana kota sebagai kalangan dengan latarbelakang sosial-ekonomi yang beragam tanpa harus mengorbankan mereka yang lemah demi kepentingan investasi dan pencitraan kota.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk-bentuk resistensi PKL di Tanjungpinang, strategi yang dilakukan, serta dampaknya terhadap perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan model kebijakan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang memadai dalam proses pembangunan kota.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi literatur sebagai strategi utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Studi literatur dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis fenomena perlawanan perdagangan kaki lima terhadap kebijakan ekonomi lokal yang diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Tanjungpinang, melalui telaah mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan baik dari segi konseptual maupun empiris. Studi literatur ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen ilmiah seperti jurnal akademik, prosiding seminar, laporan penelitian, skripsi, tesis serta buku-buku yang memuat kajian tentang perdagangan kaki lima, kebijakan ekonomi lokal, teori resistensi sosial, pengelolaan ruang publik, serta dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan negara di tingkat lokal.

Seluruh sumber yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan interpretatif, yaitu dengan memahami makna yang terkandung di balik teks secara mendalam, serta mengidentifikasi pola-pola argumentasi yang berkaitan dengan tema perlawanan PKL terhadap kebijakan pemerintah daerah, faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhi relasi antara negara dan warga, serta konsekuensi jangka panjang dari interaksi tersebut terhadap keberlanjutan ekonomi informal di perkotaan.

Dengan menggunakan metode literatur ini peneliti berfokus pada **pemaknaan kontekstual** dan penyusunan argumen berbasis bukti yang telah diverifikasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menyusun peta pemikiran dan refleksi kritis terhadap kebijakan dan praktik yang telah terjadi sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan konseptual bagi penelitian lanjutan maupun pengambilan kebijakan yang adil dan partisipatif di masa mendatang.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial ekonomi PKL serta implikasi kebijakan yang timbul dari proses perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam konteks tata kelola ruang kota yang adil dan inklusif di Tanjungpinang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi Lokal Pemerintah Kota Tanjungpinang Terkait PKL

Kebijakan ekonomi lokal terkait pedagang kaki lima (PKL) yang diimplementasi oleh pemerintah kota Tanjungpinang sering kali berfokus pada upaya penerbitan, relokasi, dan penataan. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan zona khusus PKL yang dituangkan dalam peraturan Daerah Kota Tanjungpinang no.8 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan perdagangan kaki lima. Menurut Hamid dan Susilo (2019), tujuan dari penerbitan ini adalah untuk menyediakan lingkungan usaha yang legal bagi PKL.

Pemerintah Tanjungpinang juga menerapkan sistem perizinan untuk pedagang kaki lima melalui penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU). Peraturan Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL memuat informasi terkait. Melalui sistem perizinan ini, pemerintah dengan bijak membuat basis data PKL yang dapat memudahkan proses pembinaan dan pengawasan.

Program yang menghubungkan PKL dengan pasar tradisional dan pedagang kuliner juga sering dilaksanakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2021), pemerintah Tanjungpinang telah mendirikan beberapa PKL, seperti Kawasan kuliner Tepi Laut dan Pasar Malam Jalan Diponegoro, sebagai sarana untuk menyediakan tempat yang strategis dan tertata dengan baik bagi para pedagang. Bersamaan dengan pendidikan fisik, pemerintah juga mengimplementasikan program pengembangan ekonomi melalui pelatihan bisnis dan bantuan permodalan. Program-program tersebut bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan perindustrian Kota Tanjungpinang. Menurut aziz dan hartono (2022), tujuan dari program-program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas PKL sehingga dapat berkembang menjadi usaha yang lebih formal dan lebih besar.

Penegakan aturan terkait PKL juga terjadi melalui operasi penerbitan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). menurut laporan pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2022, operasi penerbitan dilakukan terutama di area yang ditetapkan sebagai area bebas PKL, seperti trotoar protokol, taman kota, dan fasilitas lainnya. Hal ini sering kali menimbulkan perlawanan dari para guru yang takut akan penurunan kualitas mata pencaharian mereka.

Kebijakan partisipatif juga dimulai forum musyawarah antara PKL dan pemerintah. Tujuan dari pendekatan ini, menurut Mardiana (2023), adalah untuk mendapatkan rumusan kebijakan yang lebih akomodatif dari PKL. Forum-forum ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti jadwal bergilir dan pembagian zona berdasarkan jenis dagangan.

Pengembangan ekonomi lokal yang terkait dengan PKL di kota Tanjungpinang juga didukung oleh inisiatif Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta. Pemerintah telah bermitra dengan beberapa perusahaan besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan program pelatihan PKL. Menurut Penelitian Irawan (2022), kemitraan ini membantu mengurangi beban anggaran pemerintah dalam membantu mengurangi beban anggaran pemerintah dalam penelitian PKL dan juga mengembangkan model pembelajaran PKL yang lebih profesional.

Pengaruh Perlawanan PKL Terhadap Implementasi Kebijakan Ekonomi Lokal

Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tanjungpinang telah menimbulkan keterlambatan implementasi berbagai kebijakan ekonomi lokal yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, terutama kebijakan pemidahan tempat dan penataan ruang publik yang seringkali memunculkan kecemasan antara aparat pemerintah dan komunitas pedagang yang merasa terancam kehilangan mata pencaharian mereka, maka dari itu program-program yang sudah menargetkan harus mengalami penundaan dan penyesuaian penting supaya bisa membantu untuk tuntutan para pedagang yang melakukan hambatan.

Munculnya gerakan gabungan pedagang kaki lima yang terorganisir dalam bentuk paguyuban dan perkumpulan telah memaksa pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melakukan revisi yang nyata terhadap kebijakan ekonomi lokal yang semula bersifat top-down menjadi lebih keterlibatan dan menyeluruh, dengan melibatkan perwakilan pedagang dalam proses perumusan kebijakan, konsultasi publik yang lebih tegas, serta peningkatan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berguna berhasiat untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan PKL, yang mengakibatkan perubahan paradigma dalam tata kelola sektor informal di wilayah perkotaan.

Strategi perlawanan PKL yang menggunakan media sosial dan liputan pers untuk mendapatkan simpati publik telah mempengaruhi opini masyarakat luas terhadap kebijakan ekonomi lokal yang diterapkan pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga menciptakan tekanan publik yang penting dan memaksa pejabat daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan pengelolaan sektor informal yang lebih menimbang aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam implementasi program-program penataan

kota, dengan mempertimbangkan bahwa PKL merupakan bagian integral dari lingkungan ekonomi urban yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pengaruh ekonomis dari perlawanan PKL terhadap kebijakan pemindahan tempat terlihat dari terhalang program pembaruan kawasan yang penting kota yang telah diperkirakan dalam APBD Kota Tanjungpinang, karena proses penggusuran dan relokasi yang direncanakan mengalami hambatan besar-besaran sehingga beberapa proyek infrastruktur perkotaan mengalami keterlambatan penting, membengkaknya anggaran untuk proses mediasi dan sosialisasi ulang, serta kerugian material akibat bentrok fisik yang terjadi dalam beberapa operasi penertiban yang berujung permusuhan, yang pada akhirnya mengurangi keberhasilan dan tepat pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Perlawanan PKL bisa mendorong terciptanya kebijakan ekonomi alternatif yang lebih progresif, seperti pengembangan zona khusus PKL dengan prasarana memadai, program pemberdayaan usaha mikro yang lebih sangat, serta skema kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas pedagang yang berupaya mengintegrasikan sektor informal ke dalam perencanaan tata ruang kota secara lebih sistematis, sehingga perlawanan yang semula dipandang sebagai hambatan justru menjadi katalisator bagi lahirnya inovasi kebijakan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penentangan PKL terhadap implementasi kebijakan ekonomi lokal telah menciptakan ketidakpastian investasi di beberapa kawasan komersial Kota Tanjungpinang, khususnya di area-area yang menjadi lokasi konflik berkepanjangan antara pedagang dan aparat pemerintah, sehingga beberapa investor yang semula berminat membebarkan properti komersial dan sarana pariwisata menunda atau membatalkan rencana investasi mereka karena khawatir dengan ketidaktepatan sosial dan potensi konflik yang bisa mengganggu kegiatan bisnis mereka di masa depan, yang pada gilirannya mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja resmi yang dihandalkan oleh pemerintah daerah.

Perlawanan PKL juga telah menciptakan dinamika politik lokal yang berbelit belit, dengan munculnya aktor-aktor politik yang memanfaatkan masalah pedagang kaki lima sebagai basis pengerahan dukungan dalam perdebatan politik lokal di Kota Tanjungpinang, sehingga kebijakan ekonomi pada sektor informal menjadi sensitif yang sarat dengan kepentingan politik, yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah daerah yang cenderung menghindari kebijakan kontroversial menjelang periode pemilihan kepala daerah, dan menciptakan pola implementasi kebijakan yang tidak konsisten serta

cenderung kompromistis untuk menghindari resistensi yang dapat berdampak pada elektabilitas kandidat tertentu.

Pengaruh sosial yang bisa menimbulkan akibat perlawanan PKL terhadap kebijakan ekonomi lokal terlihat dari tingkatan kesadaran kolektif dan kekompakan di kalangan pedagang informal, yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih terencana dengan tuntutan yang tidak hanya berfokus pada isu ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan hak atas kota, sehingga mengubah lanskap advokasi masyarakat sipil di Kota Tanjungpinang dan mendorong lahirnya berbagai inisiatif pemberdayaan komunitas yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perspektif hak asasi manusia dan tata kelola urban yang lebih demokratis.

Pada aspek administratif, perlawanan PKL telah memaksa birokrasi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan ekonomi lokal, dengan melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan Bappeda dalam diskusi-diskusi dialog reguler dengan perwakilan pedagang, yang bertujuan menyelaraskan berbagai kepentingan dan prospek dalam perumusan kebijakan, sehingga menciptakan model tata kelola kolaboratif yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi optimalisasi implementasi kebijakan publik di berbagai sektor lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Rahman dan Kurniati (2022) mengungkapkan bahwa perlawanan PKL terhadap kebijakan ekonomi lokal di Kota Tanjungpinang telah mendorong lahirnya model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu dalam proses mediasi antara pemerintah dan komunitas pedagang, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat sebagai mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak, sehingga menciptakan pendekatan resolusi konflik yang lebih kontekstual dan diterima secara sosial, yang kemudian diadopsi sebagai mekanisme standar dalam mengatasi berbagai konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Respon Pemerintah terhadap Perlawanan PKL

Sebagai tanggapan terhadap penolakan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah Kota Tanjungpinang mengadakan forum diskusi dan musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan paguyuban PKL, tokoh masyarakat, akademisi, dan pejabat terkait. Tujuan dari forum ini adalah untuk mendiskusikan aspirasi dan keberatan para pedagang terhadap kebijakan ekonomi lokal yang sedang dilaksanakan, dan untuk

memfasilitasi komunikasi dua arah yang memungkinkan semua pihak mengkomunikasikan kepentingannya.

Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai tanggapan atas perlawanan PKL yang semakin terorganisir. Revisi ini memasukkan saran dari berbagai konsultasi publik yang telah dilakukan, seperti zonasi yang lebih fleksibel, sistem perizinan yang lebih sederhana, dan mekanisme transisi yang lebih manusiawi bagi pedagang yang terdampak kebijakan relokasi, yang memungkinkan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk memastikan bahwa Untuk menanggapi hal ini, pemerintah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi pedagang kaki lima (PKL).

Program-program ini mencakup pelatihan manajemen usaha, bantuan permodalan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro, keterampilan pemasaran digital, dan pendampingan usaha berkelanjutan. Semua program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah barang-barang pedagang kaki lima sehingga mereka dapat menjadi wirausaha yang lebih sadar diri.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menanggapi perlawanan PKL yang menggunakan strategi media dan advokasi publik dengan meningkatkan transparansi proses perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi lokal melalui publikasi kajian akademis, hasil konsultasi publik, dan dokumen perencanaan terkait penataan PKL di portal resmi pemerintah. Selain itu, mereka melakukan kampanye komunikasi publik yang lebih besar untuk menjelaskan rasionalitas, tahapan implementasi, dan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Pemerintah mengubah strategi penertiban di tingkat operasional dengan menggunakan metode persuasif dan bertahap yang lebih mengutamakan edukasi dan sosialisasi daripada tindakan represif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diinstruksikan untuk mengutamakan pendekatan dialogis dan memberikan waktu yang memadai bagi pedagang untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku sebelum menerapkan sanksi administratif atau tindakan penertiban fiktif.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menanggapi kebutuhan PKL akan lokasi strategis dengan mendirikan sentra PKL seperti Pasar Tiban Senggarang, Sentra Kuliner Tepi Laut, dan Zona PKL Taman Kota. Sentra-sentra ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat ibadah, parkir, dan sistem pengelolaan sampah, sehingga memberika

Selain itu, pemerintah daerah mengambil tindakan dengan membentuk tim mediasi khusus yang terdiri dari perwakilan dari berbagai dinas terkait, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Tim ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses

penyelesaian konflik antara pemerintah dan PKL melalui mekanisme yang lebih terorganisir dan berorientasi pada kesepakatan, dengan mengidentifikasi akar masalah, memetakan kepentingan para pihak, dan mengembangkan solusi yang dapat diterima untuk masing-masing pihak.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menanggapi resistensi PKL terhadap kebijakan ekonomi lokal dengan mengembangkan skema kemitraan publik-swasta-masyarakat (public-private-community partnership) dalam pengelolaan zona PKL. Dalam skema ini, pihak swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung, pemerintah memberikan regulasi dan pengawasan, dan komunitas PKL bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi dampak kebijakan secara berkala sebagai bagian dari respons komprehensif terhadap perlawanan PKL. Ini dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi lokal dan lembaga penelitian independen untuk melihat seberapa efektif berbagai program dan regulasi yang telah diterapkan, menemukan masalah dalam implementasi, dan membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan empiris. Ini memungkinkan siklus kebijakan adaptif yang memungkinkan

Pada tingkat kebijakan strategis, pemerintah Kota Tanjungpinang menanggapi dengan mengintegrasikan pengelolaan sektor informal ke dalam perencanaan tata ruang kota dan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan menerapkan konsep "ekonomi kota yang inklusif", pemerintah mengakui kontribusi sektor informal terhadap perekonomian kota, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, kebijakan yang mengatur PKL tidak lagi dianggap sebagai permainan.

Solusi

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Tanjungpinang serta kebijakan pemerintah yang ada, terdapat beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk menciptakan situasi yang lebih harmonis dan produktif antara kedua belah pihak.

Pertama-tama, penting untuk membentuk forum musyawarah yang melibatkan tidak hanya perwakilan PKL, tetapi juga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan yang berkaitan dengan PKL dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, mengikutsertakan perwakilan PKL dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa suara mereka didengar dan

di pertimbangkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Selanjutnya pemerintah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih komprehensif dengan menyediakan pelatihan bisnis dan manajemen yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran para PKL. Selain itu, menciptakan skema bantuan modal yang lebih aksesibel bagi PKL akan sangat membantu mereka dalam memperkuat usaha dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam hal penataan ruang, mendirikan zona khusus untuk PKL yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti sanitasi yang baik, tempat ibadah, dan area parkir yang cukup, akan memberikan ruang yang layak bagi mereka untuk beroperasi. Di samping itu, mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam regulasi zonasi akan memungkinkan PKL untuk beroperasi tanpa kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi pada ekonomi lokal.

Penting juga untuk melakukan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kontribusi PKL terhadap ekonomi lokal dan sosial, sehingga masyarakat lebih memahami peran penting mereka dalam kehidupan ekonomi kota. Memanfaatkan media sosial sebagai alat advokasi untuk membangun opini publik yang positif mengenai keberadaan PKL dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap PKL juga merupakan langkah krusial dengan memastikan bahwa kebijakan bersifat adaptif dan dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dilapangan, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dan memperbaiki kebijakan yang tidak efektif. Dengan menerapkan solusi atas secara terpadu, diharapkan hubungan antara PKL dan pemerintah kota Tanjungpinang dapat menjadi lebih harmonis, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi lokal yang inklusif yang berkelanjutan

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pedagang kaki lima (PKL) Kota Tanjungpinang manifestasi structural dari Gerakan konstruksi neoliberal yang menekankan pada efisiensi, estetika, dan modernisasi, serta kebutuhan social dan ekonomi masyarakat, yang menggambarkan sector informal sebagai sumber Utama kemiskinan. Perlawanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kegiatan simbolik, hukum, dan budaya, seperti paguyuban, petisi, media, dan bahkan membangun aliansi dengan berbagai organisasi dan komunitas, yang

kesemuanya bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi kebijakan yang adil dan inklusif. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab dengan menerapkan strategi penertiban yang lebih persuasif dan edukatif, serta mengembangkan program-program pengembangan ekonomi yang komprehensif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pengembangan kawasan khusus PKL dengan fasilitas yang lengkap. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan sosialisasi kebijakan agar masyarakat luas memahami rasionalitas situasi yang terjadi dan mengembangkan komunikasi yang lebih dialogis agar perselisihan tidak meningkat menjadi konflik serius yang merugikan kedua belah pihak.

Meskipun demikian, keberadaan PKL tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, termasuk menyediakan layanan terkait pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Perlawanan ini dapat menjadi katalisator bagi munculnya kebijakan ekonomi alternatif yang lebih inklusif, seperti pengembangan zona khusus PKL dan program-program yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas pedagang, yang berfokus pada pengintegrasian sektor informal ke dalam tata ruang kota secara lebih sistematis dan komprehensif. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota dari waktu ke waktu sangat tergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang saling menghargai dan bekerja sama. Kebijakan pembangunan harus dapat mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan hak-hak seluruh anggota masyarakat, termasuk PKL, yang secara historis telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi kota. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel terhadap lingkungan sosial ekonomi, diharapkan tata kelola ruang kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan aman, efektif, dan berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkesinambungan.

REFERENCES

- Abas, A. R. H. (2020). Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah dalam pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) Rumah Coklat Kota Palu dalam perspektif ekonomi Islam (Disertasi doktoral, IAIN Palu).
- Anggraini, D. (2022). Pengaruh pemahaman ilmu akuntansi, kecanggihan teknologi informasi, dan sikap kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang (Disertasi doktoral, STIE Pembangunan Tanjungpinang).
- Aprilsesa, T. D., & Abunawas, A. (2024). Evaluasi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pendidikan. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 228–243.

- Kurniawati, F. (2022). Analisis strategi bertahan hidup pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Dolopo Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo (Disertasi doktoral, IAIN Ponorogo).
- Novrina, P. D., Nanda, A. E., Daeli, A. S., Handoko, H., Gunawan, H., Jeksen, J., & Fernando, M. (2025). Peran pemerintah dan manajemen pemasaran terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Tepi Laut Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 84–94.
- Nurchayono, O. H. (2014). Perangkap kemiskinan pada warga relokasi (Studi korelasional unsur-unsur perangkap kemiskinan pada warga relokasi Pucang Mojo, Kedungtungkul, Mojosoong, Jebres, Surakarta) (Disertasi doktoral, Universitas Sebelas Maret).
- Pratama, S. I., Randianto, M., & Aswandi, A. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar pesisir Tanjungpinang. *Student Research Journal*, 1(6), 220–231.
- Sintani, P., Nurlianti, A., Halim, A., & Candra, M. (2023). Persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di Laman Boenda Kota Tanjungpinang. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(4), 205–221.
- Sitorus, P. S., Sri, W., & Emmy, S. (2022). Perlawanan pedagang kaki lima di Laman Boenda Kota Tanjungpinang (Disertasi doktoral, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Suryadi, M. H., Fatahurrazak, S. E., Ak, M., Adhayanto, C. D. O., Arianto, B., & Sos, S. Kajian pengembangan bisnis BUMD Kota Tanjungpinang. (Data penerbitan tidak tersedia, harap lengkapi jika memungkinkan).
- TIARA, P. P., Suryaningsih, S., & Wahyuni, S. (2024). Relasi sosial owner gerobak dengan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang (Disertasi doktoral, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Wisdasari, A. S., & Ikhwan, I. (2024). Adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang (Studi kasus di Pasar Raya Padang). *Jurnal Perspektif*, 7(4), 512–522.